

BAB I

PENDAHULUAN

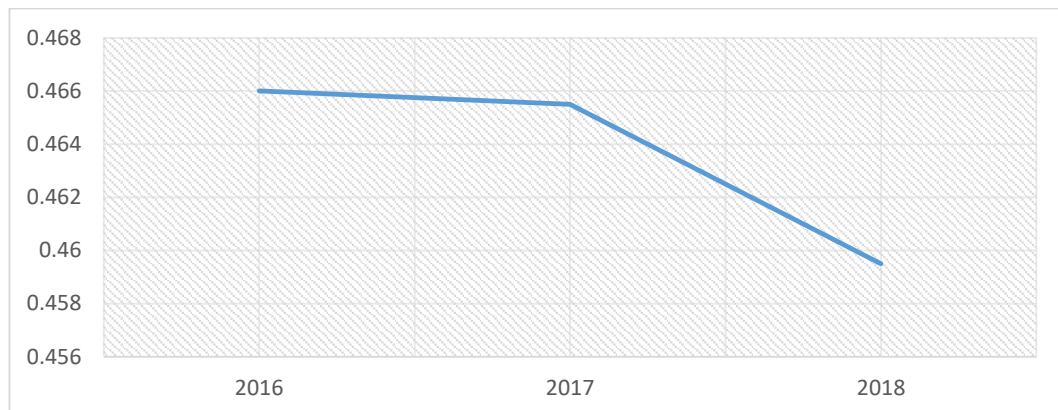
1.1 Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini, hampir semua negara di dunia sedang bekerja keras untuk melaksanakan pembangunan. Pada hakikatnya pembangunan ekonomi di suatu negara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan pembangunan perekonomian yang merata di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi seringkali dijadikan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan suatu negara. Kuznets (1995) dalam Todaro (2006:163) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang dan jasa untuk penduduknya. Kemampuan itu tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan dan ideologi yang diperlukannya. Idealnya, pembangunan ekonomi akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kenyataannya, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat karena akan tetap ada ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan. Kegiatan pembangunan setiap daerah tidak terlepas dari ketimpangan pendapatan. Masalah ketimpangan pendapatan merupakan masalah pokok yang akan selalu dikaitkan dengan pembangunan ekonomi, baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang.

Ketimpangan pendapatan adalah keadaan dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan ditentukan oleh tingkat pembangunan, heterogenitas etnis, ketimpangan juga berkaitan dengan

kediktatoran dan pemerintah yang gagal menghargai *property rights* (Glaeser, 2006). Ketimpangan pada distribusi pendapatan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat golongan bawah menikmati sedikit dari pendapatan nasional (Rizka, 2019). Permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan tersebut merupakan suatu masalah yang penting dan harus segera diatasi karena ketimpangan pendapatan berdampak bukan hanya dalam hal ekonomi tetapi juga dalam hal sosial. Todaro (2003) menyebutkan alasan mengapa ketimpangan harus diperhatikan, yaitu ketimpangan yang tinggi dapat menyebabkan inefisiensi ekonomi serta melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas. Ketimpangan yang makin tinggi antar golongan maupun antarwilayah juga dapat menimbulkan permasalahan seperti kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang semakin tajam dan melebar.

Masalah ketimpangan ekonomi pada dimensi distribusi pendapatan ini merupakan sebuah realita yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). DIY terdiri dari empat kabupaten dan satu kota yaitu Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Dalam proses pembangunan ada daerah yang sumber daya alamnya melimpah tetapi kurang dalam sumber daya manusia, namun sebaliknya ada daerah yang kurang dalam hal sumber daya alam tetapi sumber daya manusianya melimpah, baik secara kualitas maupun kuantitas. Keadaan ini selanjutnya menyebabkan perbedaan dalam perkembangan pembangunan yang mengakibatkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan kesejahteraan di masing-masing daerah.



Sumber: Badan Pusat Statistik

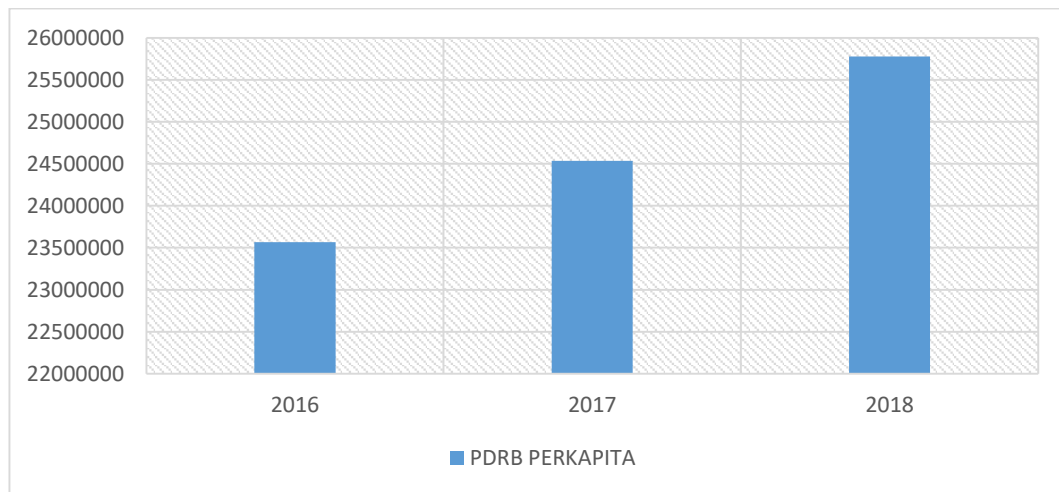
Gambar 1.1
Indeks Williamson
Antar Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2016-2018

Gambar 1.1 menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di DIY yang diukur oleh Indeks Williamson selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Di satu sisi, Indeks Williamson memang mengalami penurunan, tetapi di sisi lain penurunan tersebut tidak membawa pengaruh yang cukup signifikan karena nilai Indeks Williamson masih berada dibatas atas moderat ($0,35 < IW < 0,5$) sebesar 0,4595 pada tahun 2018. Artinya, distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota di DIY masih belum merata sehingga harus diwaspadai dan menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pembangunan.

Ketimpangan distribusi pendapatan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor ekonomi maupun non-ekonomi. Faktor ekonomi yang sering dikaitkan dengan ketimpangan distribusi pendapatan adalah kondisi makroekonomi suatu wilayah. Sedangkan untuk faktor non-ekonomi antara lain kondisi demografi, kondisi alam, politik dan budaya dari wilayah yang bersangkutan (Simon Fuglsang, 2003) dalam jurnal Riska Dwi Astuti (2015). Dalam penelitian ini akan

menggunakan faktor ekonomi. Menurut penelitian Hartini (2017) menyimpulkan secara bersama-sama variabel PDRB perkapita, Investasi dan IPM berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2011-2015. Sedangkan penelitian dari Edi Haryoto (2017) menyimpulkan bahwa variabel Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi dan Aglomerasi berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2014 secara bersama-sama. Dari hasil penelitian tersebut, penulis mengambil 3 variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu: Pertama PDRB perkapita. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran yang dapat melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit aktivitas ekonomi dalam suatu daerah/wilayah pada periode tertentu (BPS, 2018:15).

Dengan kata lain, data PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Oleh karena itu, nilai PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi (faktor produksi) di daerah tersebut. Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat suatu daerah adalah PDRB Perkapita. Semakin tinggi PDRB Perkapita suatu daerah maka semakin besar potensi sumber pendapatan daerah tersebut (Thamrin, 2001) dalam jurnal Hartini (2017). Dalam pengertian lain, jika pendapatan suatu daerah tinggi maka akan mengurangi ketimpangan yang terjadi pada daerah tersebut.



Sumber: Badan Pusat Statistik DIY, diolah

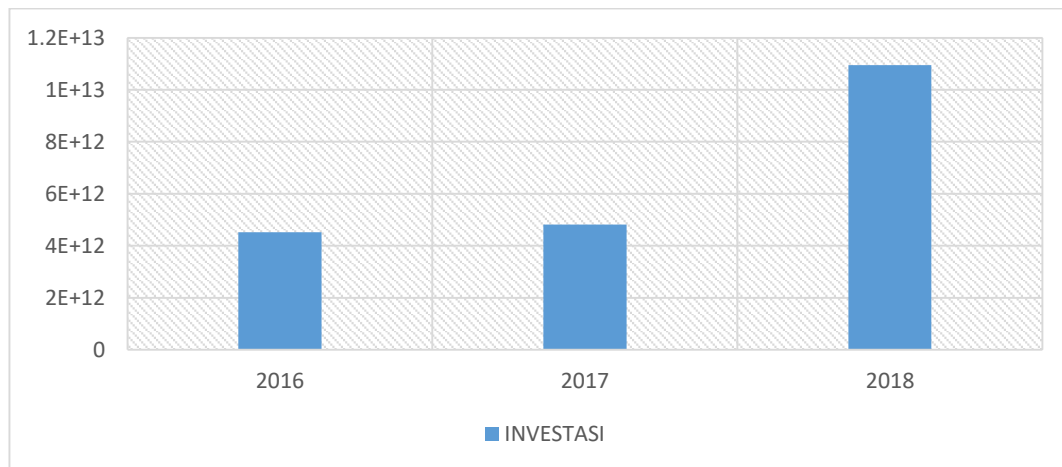
Gambar 1.2
PDRB Perkapita Provinsi DIY dan Pertumbuhannya
Tahun 2016-2018

Berdasarkan gambar 1.2 perkembangan nilai PDRB perkapita DIY selama tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah secara kasar. PDRB perkapita DIY atas dasar harga konstan tahun 2016 tercatat sebesar Rp 23 juta kemudian meningkat menjadi Rp 25 juta di tahun 2018. Secara kasar, peningkatan level tersebut menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk DIY secara rata-rata yang semakin membaik dengan asumsi faktor produksi yang menggerakkan perekonomian dimiliki oleh penduduk DIY. Peningkatan tersebut juga terjadi karena PDRB DIY yang relatif tinggi sementara penambahan jumlah penduduknya tidak terlalu besar.

Faktor kedua yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah investasi. Investasi merupakan penanaman modal di suatu perusahaan tertentu. Menurut Badan Pusat Statistik (2018:4), investasi mempunyai peranan penting

dalam proses pembangunan yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Alasannya karena alokasi investasi merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi dan menentukan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi wilayah. Investasi yang dimaksudkan dapat berbentuk investasi swasta, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), maupun investasi pemerintah yang disalurkan melalui anggaran pembangunan nasional dan daerah (Sjafrizal,2017:127). Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (2019:14), investasi juga terdiri dari investasi fisik dan finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

Menurut Dewi (2009) dalam Taufik, dkk (2014) menunjukkan bahwa adanya penanaman modal yang dilakukan di suatu daerah, baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) akan mengakibatkan penyerapan tenaga kerja sehingga proses produksi menjadi produktif. Adanya investasi asing di dalam masyarakat akan sangat membantu dan menambah kesempatan kerja sehingga pendapatan masyarakat pun bertambah begitu juga dalam jaringan yang lebih luas akan menambah pendapatan nasional suatu negara (Syah, 2005 dalam Taufik, dkk 2014). Dengan meratanya investasi disetiap daerah yang dapat dirasakan oleh setiap masyarakat akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga akan memperkecil kesenjangan pendapatan yang terjadi antar daerah. Sebaliknya, terkonsentrasinya investasi hanya di beberapa daerah saja hanya akan memperlebar ketimpangan pendapatan.



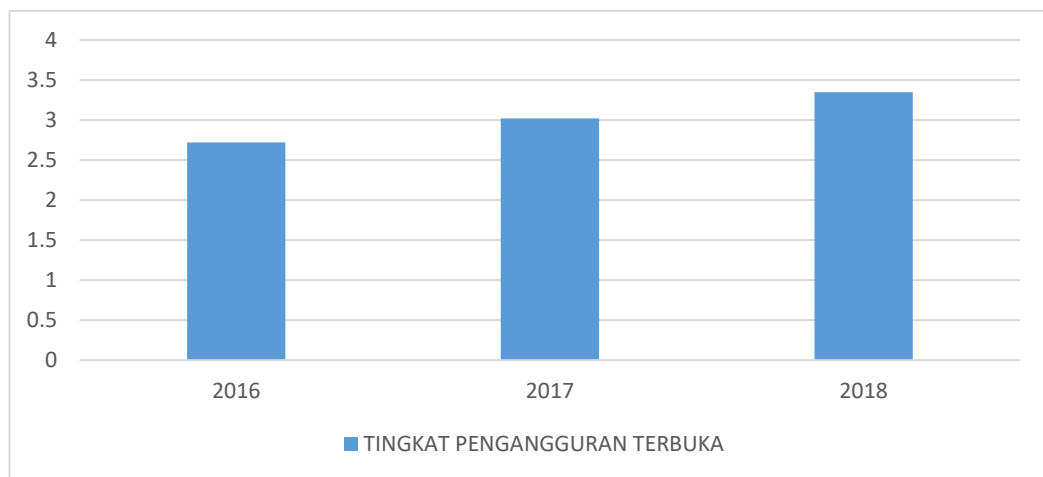
Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.3
Investasi
Provinsi DIY Tahun 2016-2018

Berdasarkan gambar 1.3 terjadi peningkatan investasi dari tahun 2016 ke tahun 2018. Peningkatan nilai investasi di Provinsi DIY tersebut terjadi karena semakin gencarnya promosi dan perbaikan layanan bagi investor yang akan menanamkan modalnya di DIY. Perkembangan investasi yang semakin meningkat juga disebabkan beberapa faktor seperti sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kondisi lokasi di wilayah tersebut. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu kota tujuan wisata memiliki potensi yang tinggi dikarenakan sumber daya yang dimiliki jumlahnya melimpah sehingga dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di DIY.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan antar daerah yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Menurut Sjafrizal (2014:176), tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat daerah. Tingkat pengangguran yang tinggi mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih rendah.

Sebaliknya, jika tingkat penganggurannya rendah maka kesejahteraan masyarakatnya tinggi. Indikator ini sangat penting bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk besar sebagai penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak merupakan sasaran utama pembangunan daerah yang bersifat strategis. Rendahnya partisipasi tenaga kerja yang dilihat dari tingkat pengangguran terbuka tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat saja, tetapi juga pembangunan daerah.



Sumber: Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY

Gambar 1.4
Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi DIY Tahun 2016-2018

Gambar 1.4 menunjukkan perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DIY selama periode 2016-2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 TPT sebesar 2,72 persen meningkat menjadi 3,35 persen di tahun 2018. Menurut Badan Pusat Statistik (2018) salah satu penyebab peningkatan tingkat pengangguran terbuka ini adalah hujan yang terlambat turun membuat masa tanam padi dan masa panen padi menjadi bergeser. Selain itu, penduduk yang telah menyelesaikan pendidikannya selama setahun terakhir masih banyak yang belum

terserap dalam pasar kerja. Hal yang menarik adalah bahwa proyek investasi bandara *New Yogyakarta International Airport (NYIA)* tidak cukup signifikan dalam menekan angka pengangguran. Hal ini dimungkinkan adanya tenaga kerja yang dipekerjakan tidak hanya berasal dari DIY saja tetapi berasal dari luar DIY (BPS).

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan di suatu wilayah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2000-2018”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah yang dapat diambil sebagai dasar kajian dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh PDRB Perkapita, Investasi, dan TPT terhadap Ketimpangan Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2000-2018 secara parsial?
2. Bagaimana pengaruh PDRB Perkapita, Investasi, dan TPT terhadap Ketimpangan Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2000-2018 secara bersama-sama?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB Perkapita, Investasi, dan TPT terhadap Ketimpangan Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2000-2018 secara parsial.
2. Untuk mengetahui pengaruh PDRB Perkapita, Investasi, dan TPT terhadap Ketimpangan Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2000-2018 secara bersama-sama.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran umum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan suatu daerah khususnya di Provinsi DIY dalam kurun waktu 2000 hingga 2018. Serta sebagai cara mengamalkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan untuk dipahami lebih

jauh dalam pembuatan kebijakan selanjutnya guna mengatasi permasalahan yang ada.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai salah satu tambahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan pembaca mengenai analisis determinan ketimpangan pendapatan.

1.5 Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Tasikmalaya dengan pengambilan data dari *website* Badan Pusat Statistik Provinsi DIY, sedangkan data lainnya diambil dari *website* Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DIY yang menyajikan data *valid*.

1.5.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari terbitnya surat keputusan pada tanggal 5 September diawali dengan pengajuan judul, pengumpulan data, pembuatan usulan penelitian, seminar usulan penelitian, penyusunan skripsi, dan sidang skripsi.

Berikut matriks jadwal penelitian:

Tabel 1.1

Matriks Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Keterangan	Bulan																							
	Agustus				September				Oktober				November				Desember				Januari			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Persiapan Administrasi				■																				
Pengajuan Judul				■																				
Pengumpulan data				■	■	■	■																	
Pembuatan Usulan Penelitian				■	■	■	■	■	■	■	■													
Seminar Usulan Penelitian											■													
Revisi Usulan Penelitian dan Analisis Data														■	■	■	■	■						
Penyusunan Naskah Skripsi																	■	■	■	■	■			
Pendaftaran Sidang Komprehensif																					■			
Sidang Komprehensif																						■		